



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

Jl. Jend. Sudirman

Telp : (0541) –

email :

Website :

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT. atas segala Rahmat dan KaruniaNya kepada kita, Alhamdulillah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) untuk Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan industri dan perdagangan, selain itu penyusunan Renstra disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis serta sebagai bahan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri dan perdagangan.

Renstra ini disusun dan memuat gambaran umum sektor industri dan perdagangan, isu-isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat berdampak pada Laju Pertumbuhan Ekonomi kategori industri pengolahan, serta sektor perdagangan dan peningkatan hilirisasi produk-produk pertanian dalam arti luas.

Tenggarong, 06 September 2021

Plt. KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Drs. H. TAJUDDIN.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640405 198603 1 036

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1. Landasan Hukum	2
1.2. Maksud Dan Tujuan	5
1.3. Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8
2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8
1.1.1. Tugas	8
1.1.2. Fungsi	8
2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11
2.2.1. Sumber Daya Manusia	11
2.2.2. Sarana Dan Prasarana	13
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24
2.4. Pelaksanaan Anggaran Dan Realisasi Belanja	26
2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25
2.5.1. Tantangan	25
2.5.2. Peluang	25
BAB III	27
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan DISPERINDAG	27
3.2. Telaahan Visi, Misi, & Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Telaahan Renstra Provinsi	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	26
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	29
BAB IV	30

TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan	30
4.2 Sasaran.....	31
BAB V	35
STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
5.1 <i>STRATEGI 1</i> PENINGKATAN NILAI TAMBAH, LAPANGAN KERJA, DAN INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI KECIL MENENGAH PENGOLAHAN NON MIGAS.....	35
5.2 <i>STRATEGI 2</i> PENGUATAN PENGUASAAN PASAR DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA JARINGAN DISTRIBUSI BARANG	36
5.3 <i>STRATEGI 3</i> PENGUATAN LAYANAN PERDAGANGAN YANG TERTIB (NIAGA, MUTU DAN UKUR) DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN	37
BAB VI	39
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	39
BAB VII	54
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII	56
PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Sarana kerja s/d Tahun 2021	13
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Kutai Kartanegara.....	25
Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Kutai Kartanegara.....	26
Tabel 4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	28
Tabel 5. Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	31
Tabel 6. Perbandingan Sasaran Kementerian,Dinas Provinsi dengan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kab. Kutai Kartanegara	25
Tabel 7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	28
Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.....	32
Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ..	37
Tabel 10. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	40
Tabel 11.Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	10
Gambar 2. Komposisi ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021.....	11
Gambar 3. Komposisi PNS Menurut Bidang.....	12
Gambar 4. Komposisi Pegawai Menurut Golongan.....	12
Gambar 5. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan	13
Gambar 6. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 272 mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 65 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagai Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi : a). Perumusan Kebijakan di bidang Perindustrian dan perdagangan. b). Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perindustrian dan perdagangan, c). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian dan perdagangan. d). Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perindustrian dan perdagangan pelaksanaan e). fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 wajib disusun sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan sesuai dengan urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini dilakukan dengan memformulasikan secara linear atas perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan juga dilakukan perumusan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang lebih terukur guna akselerasi pencapaian Visi dan Misi daerah sesuai dengan RPJMD.

1.1 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang -undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran Negara RI nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 6).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21).
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016).

1.2. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sebagai dasar perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan renja, selain itu penyusunan renstra juga dilakukan dalam rangka menyesuaikan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam upaya percepatan pencapaian Visi dan Misi

Daerah guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2022–2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan capaian pembangunan bidang industri dan perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam menjalankan tugas dan fungsi.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sebagai instrumen untuk pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 2021-2026.

1.3. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Sumber Daya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan
2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi
2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat dijabarkan bahwa Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.1.1 Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2016 tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

1.1.2 Fungsi

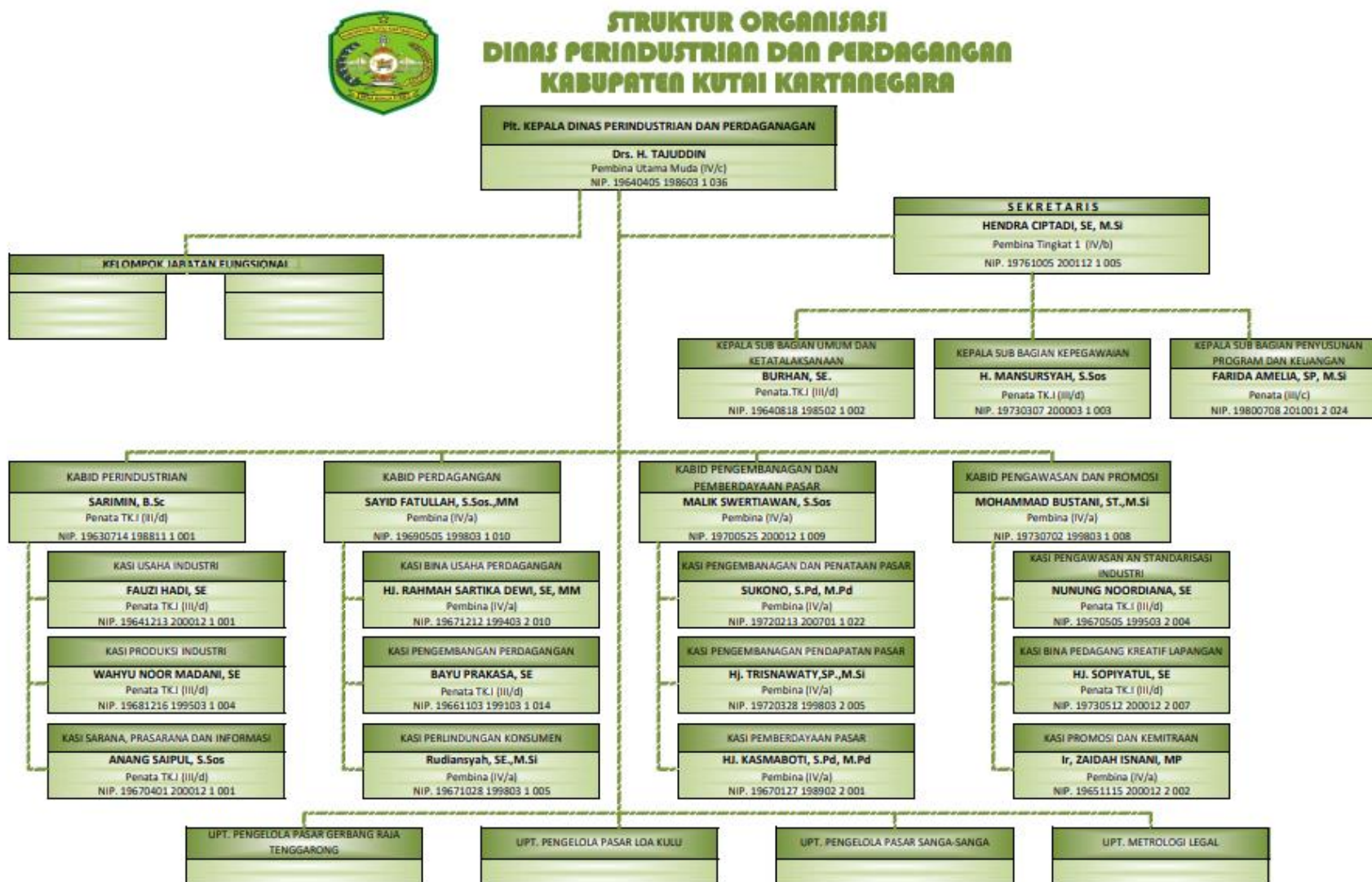
Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan;
- c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - 1. Seksi Usaha Industri;
 - 2. Seksi Produksi Industri;
 - 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Informasi.
- d. Bidang Perdagangan membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengembangan Perdagangan;
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen
- e. Bidang Pengembangan Dan Pemberdayaan Pasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;
 - 2. Seksi Pengembangan Pendapatan Pasar;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Pasar.
- f. Bidang Pengawasan Dan Promosi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Standarisasi Industri;
 - 2. Seksi Bina Pedagang Kreatif Lapangan;
 - 3. Seksi Promosi dan Kemitraan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)



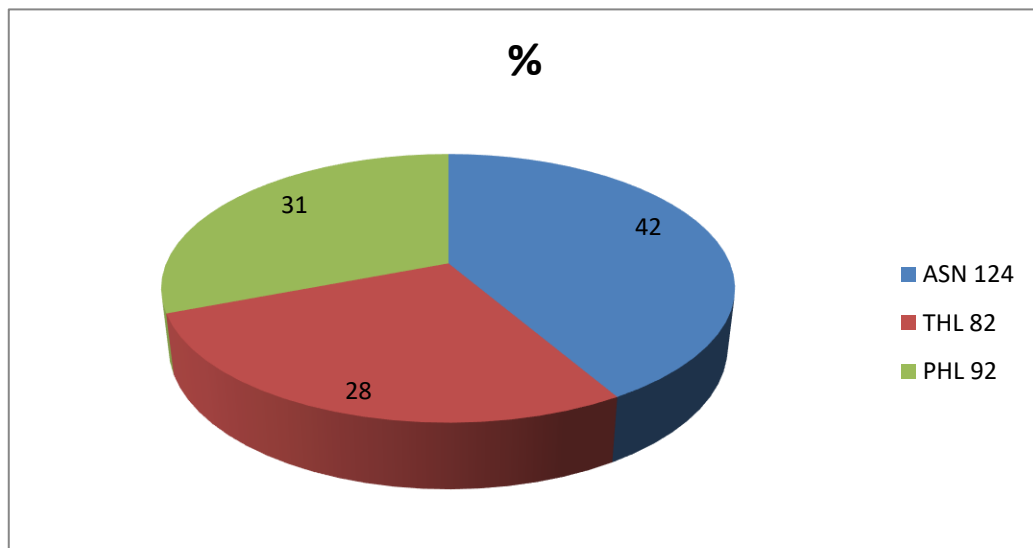
2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Kutai kartanegara tahun 2021 sebanyak 298 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 124 orang (42%), Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 82 orang (28%) , Prakarya Harian Lepas (PHL) sebanyak 92 orang (31%) dapat dijelaskan pada grafik berikut:

Gambar 2. Komposisi ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

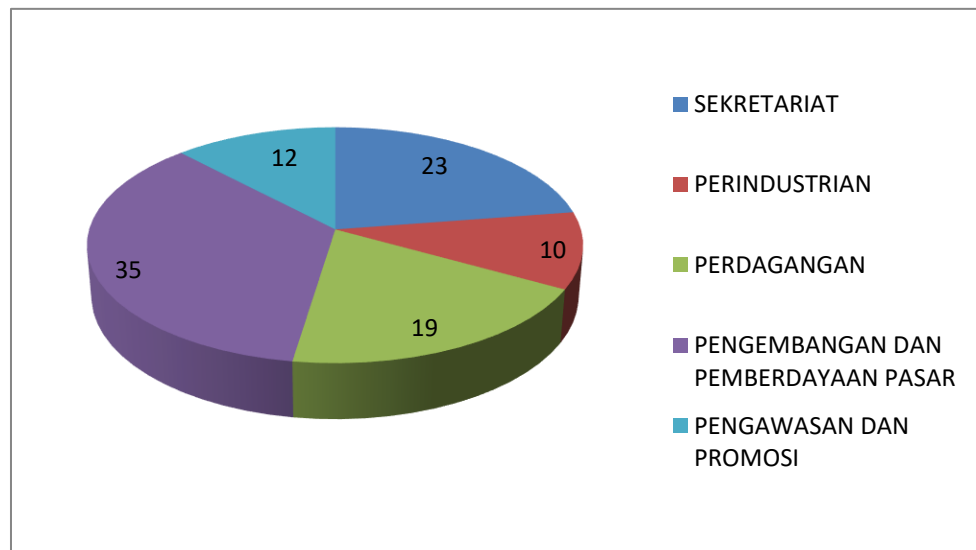


Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, Per Juni 2021

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai kartanegara tahun 2021 sebanyak 124 orang yang tersebar di 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat. Jumlah ASN pada Sekretariat sebanyak 28 Orang (23 %), Bidang Perindustrian sebanyak 13 Orang (10 %), Bidang Perdagangan sebanyak 24 Orang (19 %), Bidang Pengawasan dan Promosi sebanyak 15 Orang (12

%) dan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar sebanyak 44 Orang (35 %).

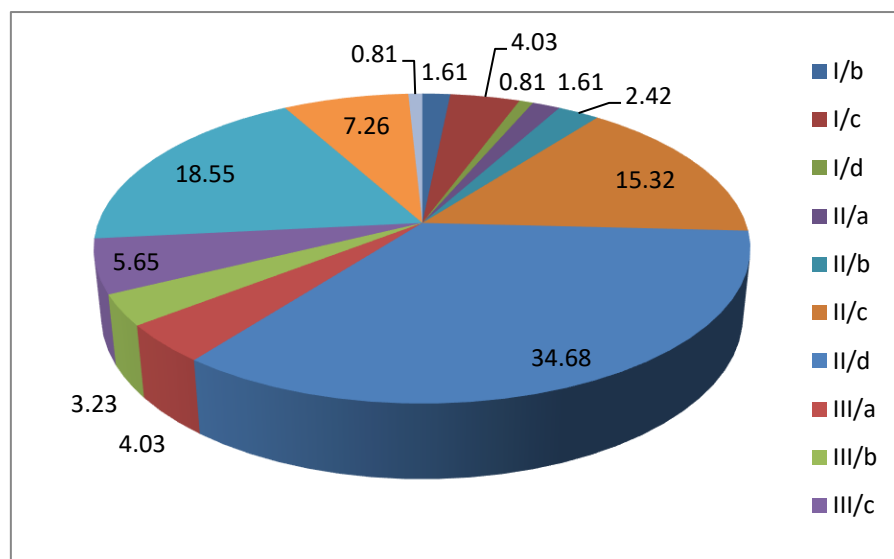
Gambar 3. Komposisi PNS Menurut Bidang



Sumber: Sub bagian Kepegawaian DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, Per Juni 2021

Berdasarkan golongan dan pangkat maka komposisi ASN di Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah 124 orang PNS, terdiri dari Golongan I/a 0 orang, Golongan I/b 2 orang, Golongan I/c 5 orang, Golongan I/d 1 orang, golongan II/a 2 orang, Golongan II/b 3 orang, Golongan II/c 19 orang, Golongan II/d 43 orang, Golongan III/a 5 orang, Golongan III/b 4 orang, Golongan III/c 7 orang, Golongan III/d 23 orang, Golongan IV/a 9 orang, Golongan IV/b 1 orang, Golongan IV/c 0 orang.

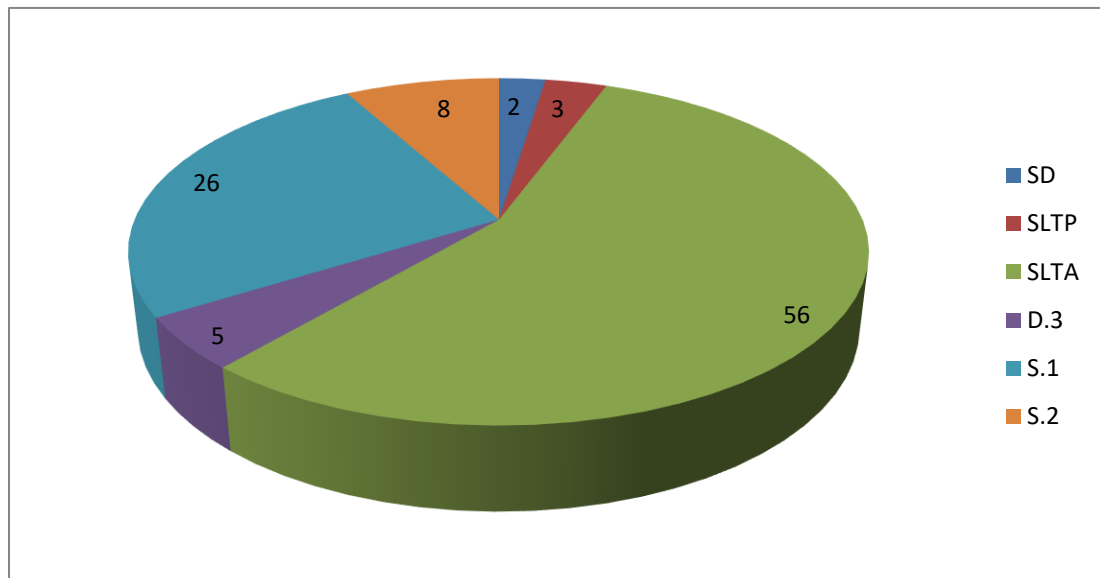
Gambar 4. Komposisi Pegawai Menurut Golongan



Sumber: Sub bagian Kepegawaian DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, Per Juni 2021

Berdasarkan komposisi tingkat pendidikan, maka Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Kutai kartanegara sebagaimana terdiri dari 124 orang, untuk yang berpendidikan SD sebanyak 3 orang, berpendidikan SLTP sebanyak 4 orang, berpendidikan SLTA/SMK sebanyak 69 orang, berpendidikan D-III sebanyak 6 orang, berpendidikan S-1 sebanyak 32 orang, dan berpendidikan S-2 sebanyak 10.

Gambar 5. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan



Sumber: Sub bagian Kepegawaian DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, Per Juni 2021

Dengan demikian, karakteristik kompetensi sumber daya aparatur pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Kartanegara didominasi oleh PNS dengan latar pendidikan SLTA/sederajat.

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Kondisi Sarana kerja s/d Tahun 2021

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Pasar	1	UPP Loa Kulu (Kota) (9130 m2)	2005
2	Tanah Bangunan Pasar	1	UPP Loa Kulu (Tepi Sungai) (1005 m2)	2005
3	Tanah Bangunan Pasar	1	Sanga-Sanga (496 m2)	2005
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Tanah Kantor Bidang Perindag Dinas Perindustrian dan Perdagangan (500 m2)	2005
5	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	Tangga Arung (9780 m2)	2005
6	Tanah Bangunan Pasar	1	Tanah Pasar Samboja Kuala (7715 m2)	2010
7	Tanah Bangunan Pasar	1	Semangko Marangkayu (5000 m2)	2011
8	Tanah Bangunan Pasar	1	Tanah Pasar Sungai Mariam Anggana (8000 m2)	2012
9	Tanah Bangunan Pasar	1	UPP Mangkurawang (14402 m2)	2013
10	Tanah Bangunan Pasar	1	UPP Mangkurawang (1937 m2)	2013
11	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen	1	UPP Sanga-Sanga	2004
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Bidang Perindustrian dan Perdagangan	2005
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	UPP Tangga Arung (Sisa Terbakar)	2005
14	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	Pasar Desa Semangko Kec. Marangkayu	2008
15	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	Pasar Desa Wonotirto Kecamatan Samboja	2008
16	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	Bangunan Pasar Loa Janan Ulu	2009
17	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Pembuatan Knopy Polykarbonat Pasar Tangga Arung	2009
18	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	Pasar Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak	2010
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kantor Bidang Pengeloa Pasar	2010
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Pembuatan Drainase, Tutup Parit, Knopy, Rabat Beton dan Tempat Pembuangan Sampah UPP Loa Kulu	2010
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Pembuatan Drainase, Tutup Parit, Knopy, Rabat Beton dan Tempat Pembuangan Sampah UPP Sanga-Sanga	2010
22	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	Pembangunan Pasar Desa SP III Kec. Kota Bangun	2011
23	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	UPP Mangkurawang	2013
24	Bangunan Lain - Lain	1	Bangunan Pencacah Sampah - UPP Mangkurawang	2014
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) Desa Bakungan	2017

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
26	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Pembangunan Pasar Rakyat (DAK) Desa Loa Duri Ilir	2017
27	Dump Truck	1	Dyna 110 ET	2008
28	Dump Truck	1	New Dyna	2009
29	Portable Generating Set	1	Krisbow / KW 26-04	2008
30	Staion Wagon	1	Ford Ranger / 4x4 L200 Hitam	2005
31	Kendaraan Dinas Esselon III	3	Toyota / Rush 1.5 S (F700RE-GMMFJ) - Mopen/Minibus	2013
32	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	Toyota / Innova G M/T Bensin	2013
33	Truck + Attachment	2	toyota / DYNA 130 HT	2009
34	Pick Up	2	Izuzu / Euro-2	2007
35	Pick Up	1	Hilux 2x4	2008
36	Sepeda Motor	1	Honda / Mega Pro	2007
37	Sepeda Motor	7	Honda / Revo	2007
38	Sepeda Motor	2	Honda MF 100.SE	2008
39	Sepeda Motor	1	Honda GL600	2008
40	Sepeda Motor	1	Honda MF/125 TRF	2008
41	Sepeda Motor	3	Suzuki / Thunder	2008
42	Sepeda Motor	11	Honda / Revo	2008
43	Sepeda Motor	1	Honda / Spd Motor/Mega Pro	2009
44	Sepeda Motor	2	Honda / Spd Motor/Revo	2009
45	Sepeda Motor	1	Honda / Spd Motor/SUPRA X 125 TRF	2009
46	Sepeda Motor	2	Honda / CS 12A 1RR	2009
47	Sepeda Motor	5	Honda Revo / NF11B1D M/T	2009
48	Sepeda Motor	1	Honda / Spd mtr/Supra X125D	2010
49	Sepeda Motor	1	Honda / Spd mtr/Supra X125 TRF	2010
50	Sepeda Motor	2	Honda / Blade CW	2011
51	Sepeda Motor	3	Honda / Vario Techno CBS	2011
52	Sepeda Motor	6	Honda / Vario Techno 125 CBS ISS	2013
53	Sepeda Motor	1	Honda / Versa CW	2013
54	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3	Viar / New Karya 200 LMDT	2015
55	Gerobak Dorong	5	Lokal / P:120cm, L&T:70cm	2012
56	Gerobak Dorong	49	Krisbow / Dust Bin 120 Liter W/Pedal	2014
57	Bejana Ukur	1	DB / Custom	2017
58	Bejana Ukur	1	DB / Custom	2017
59		1	- / -	2007

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
	Alat Timbangan Lain-lain			
60	Alat Timbangan Lain-lain	3	XK 3190 / A12 Weighing Indikator	2008
61	Anak Timbangan Miligram	1	Ankatama / Custom	2017
62	Anak Timbangan Miligram	1	Ankatama / Custom	2017
63	Anak Timbangan Miligram	1	Ankatama / Custom	2017
64	Anak Timbangan dari Besi	1	Ankatama / Custom	2017
65	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	1	Honda / GX 200	2013
66	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	1	-	2013
67	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	-	2009
68	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Brader / -	2007
69	Mesin Ketik Lain-lain	2	Olivetty / Olivetty	2008
70	Mesin Ketik Lain-lain	1	Olympia / Olympia	2008
71	Mesin Ketik Lain-lain	2	Olympia / SM 18	2008
72	Mesin Penghitung Uang	2	SAP.3P Plus / SAP.3P Plus	2008
73	Mesin Penghitung Uang	2	Secure / LG-78A	2013
74	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Kyocera / KM-1635	2010
75	Lemari Besi	8	Brother	2009
76	Rak Besi/Metal	16	Krisbow / Loker 6 Doors, 31,0 Kg	2013
77	Filling Besi/Metal	7	VIP / Dua Laci	2008
78	Filling Besi/Metal	8	Brother	2009
79	Filling Besi/Metal	2	Lion / Filling Kabinet L44	2012
80	Band Kas	2	Capstone / Capstone	2006
81	Band Kas	1	Glory / Glory	2006
82	Band Kas	1	Safeguard / SD-103	2006
83	Band Kas	1	Safe Guard / LS-2	2007
84	Band Kas	1	Krisbow / -	2008
85	Band Kas	1	Uchida / -	2008
86	Band Kas	1	Krisbow / -	2009
87	Band Kas	1	safe Guard	2009
88	Lemari Kaca	9	Activ / Galant SC806 Cherry-Black	2012
89	Lemari Kaca	2	Lokal / 4 Rak @ 51 Cm	2013
90	Lemari Kaca	2	Lokal / 7 Rak @ 29 Cm	2013

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
91	Lemari Kaca	2	Lokal / 7 Rak @ 29 Cm	2013
92	Lemari Kaca	1	Lokal / 7 Rak @ 29 Cm	2013
93	Lemari Kaca	2	Lokal / 7 Rak @ 29 Cm	2013
94	Lemari Kaca	2	Lokal / -	2013
95	Lemari Kaca	1	Lokal / 4 Rak @ 45 Cm	2013
96	Lemari Kaca	1	Lokal / 4 Rak @ 44 Cm	2013
97	Lemari Kaca	2	Lokal / 4 Rak @ 40 Cm	2013
98	Lemari Kaca	3	Lokal / 4 Rak @ 40 Cm	2013
99	Lemari Kaca	1	Lokal / 4 Rak @ 40 Cm	2013
100	Lemari Kaca	1	Lokal / 4 Rak @ 40 Cm	2013
101	Lemari kayu	1	Lokal / -	2006
102	Lemari kayu	1	Haight Point / VSC 80	2008
103	Lemari kayu	1	Lokal / 4 Rak @ 35 Cm	2013
104	Papan Visuil	1	Power / Led	2014
105	Perkakas Kantor	1	Honda / SF.112000DXC	2010
106	Alat Penghancur Kertas	1	Asmic / SC 7520 CD	2013
107	Alat Penghancur Kertas	4	Asmic / SC 7520 CD	2013
108	Papan Nama Instansi	1	- / -	2006
109	Mesin Absensi	2	Secure / 16 Digit	2013
110	Lemari Kayu	1	Lokal / 2 Rak, 3 Pintu	2007
111	Lemari Kayu	1	Lokal / 2 Rak, 3 Pintu	2007
112	Lemari Kayu	14	Lokal / -	2008
113	Meja Rapat	3	Lokal / Oval Panjang	2011
114	Meja Rapat	3	Hight Point / One Conference Table	2017
115	Kursi Rapat	12	Caesar N	2010
116	Kursi Rapat	10	Creative / KM 100	2011
117	Kursi Putar	4	Fantoni / -	2007
118	Kursi Putar	3	Fantoni / F 90 AD	2008
119	Kursi Putar	10	fantoni	2009
120	Kursi Putar	6	Fantoni	2011
121	Kursi Putar	10	Chitose / Duo-02	2012
122	Kursi Putar	4	- / OC A63	2013
123	Kursi Putar	3	Oca / 62	2013
124	Kursi Putar	18	OC / A63	2014
125	Kursi Biasa	10	- / -	2006

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
126	Bangku Tunggu	1	- / 4 Seater	2008
127	Bangku Tunggu	1	Fantoni / F 864	2008
128	Meja Komputer	4	Aztec / -	2006
129	Meja Komputer	4	Aztec	2009
130	Meja Komputer	1	higtpoint	2009
131	Meja Komputer	1	Activ	2010
132	Tikar	1	Lokal / -	2006
133	Tikar	3	Woven Area / Rue Colection	2014
134	Tenda	4	- / -	2006
135	Meja Biro	8	Active / Local	2006
136	Meja Biro	4	Sucitra Furniture / -	2006
137	Meja Biro	1	Lokal / Standard 1 Biro (T:75Cm, L:80Cm, P:160Cm)	2011
138	Meja Biro	8	Lokal / Satandar (T:75Cm, L:60Cm, P:120Cm)	2011
139	Meja Biro	20	MTE 1260 / P:1200mm, L:600mm, T:750mm	2012
140	Meja Biro	10	MTE 1260 / P:1200mm, L:600mm, T:750mm	2013
141	Meja Biro	5	MTS / 10G1	2013
142	Meja Biro	18	MTE 1260 / P:1200mm, L:600mm, T:750mm	2014
143	Sofa	1	Lokal / Kayu Jati	2006
144	Sofa	1	Siro Furniture / -	2006
145	Sofa	1	Sena Hk. / 3111	2010
146	Sofa	2	Minori / (3:2:1)	2012
147	Sofa	1	Lokal / -	2013
148	Mesin Penghisap Debu	2	Nilfist / Multy 20 Inox	2013
149	Mesin Potong Rumput	1	Tanaka / Tanaka	2008
150	Lemari Es	1	Panasonic / -	2006
151	Lemari Es	2	Panasonic / Panasonic	2008
152	Lemari Es	1	Sanyo / -	2008
153	Lemari Es	3	Sharp / SJ 17MKII	2011
154	AC Unit	1	LG	2006
155	AC Unit	1	LG	2006
156	AC Unit	4	Panasonic / Panasonic	2007
157	AC Unit	2	Panasonic / Panasonic	2008
158	AC Unit	5	LG / SL S09LS-1	2008
159	AC Unit	3	LG	2010

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
160	AC Unit	1	Panasonic / CU-PC9	2010
161	AC Unit	9	LG / Jet Cool	2012
162	AC Unit	5	Changhong / CPC09C-A015	2014
163	AC Split	2	Canghong / CSC09Y3 Split 1 PK	2009
164	Kompas Gas	1	Todachi / 2 Mata + 15 Kg	2009
165	Alat Dapur Lainnya	1	Lokal / -	2009
166	Alat Dapur Lainnya	2	SP / 300	2009
167	Televisi	1	Samsung / LCD TV	2008
168	Televisi	5	Samsung / Flat TV	2008
169	Televisi	2	Sharp	2010
170	Televisi	1	LG / 32LD330	2010
171	Televisi	1	LG / LD450	2011
172	Televisi	1	LG / Ful RL	2011
173	Televisi	2	Sony / Bravia 32" EX33 LED	2013
174	Televisi	1	- / Led TV	2013
175	Wireless	1	Airlive / WH-5400 CPE	2009
176	Unit Power Supply	6	ICA / CT-682B (CE-1200)	2014
177	Camera Film	2	Canon / -	2009
178	Camera Film	1	Nikon	2010
179	Camera Film	1	Sony / W290	2010
180	Camera Film	1	Sony / Cybershot DSC W570	2011
181	Camera Film	1	Nikon / Coolpix L23	2011
182	Camera Film	1	Sony / Alpa DSLR-A390	2011
183	Tustel	1	Sony / -	2008
184	Tustel	1	Nikon	2009
185	Tustel	1	Canon	2010
186	Tustel	1	Canon	2010
187	Dispenser	2	Uchida / Uchida	2008
188	Dispenser	1	Sanken / HWD-920	2011
189	Handy Cam	1	Sony / DVD 908E	2007
190	Handy Cam	1	DCR. DVD / 610E	2008
191	Handy Cam	1	- / -	2009
192	Handy Cam	1	Sony	2010
193	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7	Lokal / Teralis Jendela Ukuran L : 90 Cm x T : 150 Cm	2013
194	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	Lokal / Teralis Jendela Ukuran L : 40 Cm x T : 60 Cm	2013

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
195	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Lokal / Teralis Pintu	2013
196	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7	Lokal / Teralis Pagar Pengaman Ukuran L : 4 M x T : 0,60 M	2013
197	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8	Lokal / Teralis Pagar Pengaman Ukuran L : 3 M x T : 0,60 M	2013
198	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Lokal / Teralis Panel Listrik Ukuran L : 60 Cm x T : 120 C	2013
199	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	Lokal / Teralis Panel Listrik Ukuran L : 50 Cm x T : 70 Cm	2013
200	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	Lokal / Teralis Panel Listrik Ukuran L : 40 Cm x T : 60 Cm	2013
201	Alat Rumah Tangga Lain-lain	30	Lokal / Teralis Jendela Lantai I	2013
202	Alat Rumah Tangga Lain-lain	24	Lokal / Teralis Jendela Lantai II	2013
203	Gorden	11	Lokal / 2 Daun Jendela	2006
204	Gorden	3	Lokal / 3 Daun Jendela	2006
205	Gorden	1	Design - 12, 280 Cm / Grade 4	2014
206	Gorden	2	Design - 12, 280 Cm / Grade 4	2014
207	Gorden	3	Design - 12, 280 Cm / Grade 4	2014
208	Gorden	14	Design - 12, 280 Cm / Grade 4	2014
209	Gorden	1	Design - 12, 280 Cm / Grade 4	2014
210	Gorden	5	Lokal / Custom	2014
211	Gorden	1	Shap Poin / SP 8005 Blue	2017
212	P.C Unit	1	LG / Fatron ez T730SH	2007
213	P.C Unit	1	LG	2009
214	P.C Unit	3	Accer	2010
215	P.C Unit	2	LG / LCD L17 WSB	2010
216	P.C Unit	2	LG	2011
217	P.C Unit	1	Lenopo / B320-57	2011
218	P.C Unit	5	Lenovo / C340	2013
219	P.C Unit	1	Lenopo / C340	2013
220	P.C Unit	1	LG 19" / Casing Dazumba DeVito 911	2014
221	P.C Unit	5	Lenovo / C240	2014
222	P.C Unit	6	HP / -	2015
223	Lap Top	1	Toshiba / Satellite M55-S3262	2006
224	Lap Top	1	Toshiba	2008
225	Lap Top	3	Fujitsu / Core 2 Duo T65	2009
226	Lap Top	1	Sony VGN / Core 2 Duo P8-	2009
227	Lap Top	2	Toshiba	2010
228	Lap Top	1	Toshiba	2010

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
229	Lap Top	1	Toshiba	2010
230	Lap Top	1	Toshiba	2010
231	Lap Top	1	Toshiba	2010
232	Lap Top	2	Toshiba / Satellite L745	2011
233	Note Book	1	Toshiba	2007
234	Note Book	5	Toshiba / Satelit U305	2007
235	Note Book	2	Toshiba / Satellite U205	2007
236	Note Book	2	- / Core 2 Duo 2,0 GHz	2008
237	Note Book	1	Toshiba	2009
238	Note Book	8	Toshiba / 10"	2010
239	Note Book	3	ACER	2011
240	Note Book	1	Toshiba / Satellite C840	2013
241	Note Book	3	Toshiba / Satellite C840	2013
242	Note Book	1	Apple / Mac Book	2014
243	Hard Disk	3	Seagate / Expansion	2010
244	Printer	1	Canon / Pixma IP 2770	2017
245	Printer	2	Canon / MP 287	2017
246	Printer	1	Panasonic / KX-MB772CX	2010
247	Printer	3	Canon / Pixma iP100	2010
248	Printer	3	Canon / Pixma MG5270	2011
249	Printer	4	Epson / LQ 2190	2012
250	Printer	5	Epson / Stylus Photo R230	2012
251	Printer	2	Epson / Inkjet Photo L800	2012
252	Printer	3	Epson / Inkjet Photo L200	2012
253	Printer	3	Epson / LQ-2190	2013
254	Printer	1	Epson / LQ-300+II	2013
255	Printer	1	HP / Laser Jet Pro 400 M451 dn.	2013
256	Printer	2	HP / Laser Jet Pro 400 M401 n.	2013
257	Scanner	1	Canon / Lide 100	2010
258	Scanner	1	Fujitsu / ScanSnap s1300i	2013
259	Scanner	1	Fujitsu / ScanSnap s1300i	2013
260	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Nortel / 2526T	2009
261	Peralatan Jaringan Lain-lain	3	- / -	2009
262	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	- / -	2009
263	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	- / -	2009

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
264	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	- / -	2009
265	Peralatan Jaringan Lain-lain	8	- / -	2013
266	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	Saga	2009
267	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Saga	2011
268	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	Big Panel / MT-201	2010
269	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	3	Haigh Point	2011
270	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Frontline / EC - 028	2008
271	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	fantoni	2009
272	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2	Frontline / Call M1 01 Call Black	2010
273	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	3	Fantoni / Lapaz	2011
274	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	Lokal / -	2006
275	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	Olympic / -	2006
276	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	active / etc 21	2011
277	Buffet Kayu	5	Lokal / -	2006
278	Audio Monitor Active	2	DVR / Decoder 4 Chanel	2013
279	Microphone/Wireless Mic	1	Shure / UT4211	2014
280	Unintemuptible Power Supply (UPS)	3	Power	2009
281	Power Amplifier	6	TOA / ZA-2060	2014
282	Camera Electronic	8	Sony CCD Camera / HA-R661 AM	2013
283	Slide Projector	1	Toshiba / TDP - S25	2007
284	Slide Projector	1	Toshiba / -	2008
285	Printer	1	Epson / LQ 2180	2008
286	Printer	1	Epson / TX 200	2008
287	Printer	1	Epson / Photo R 1800	2008
288	Mixer PVC	1	Nipon Pro / PMA-80D	2014
289	Loudspeaker	1	Nipon Pro / -	2014
290	Handy Talkie	3	Yaesu / VX-3R/E	2011
291	Facsimile	1	Panasonic / -	2008
292	Alat Komunikasi Lain-lain	2	Apple / iPad Mini	2013
293	Wireless Amplifier	1	Toa / -	2008
294	Wireless Amplifier	1	TOA / ZW-3200	2014
295	Bak Fiberglass	1	Lokal / Custom	2013
296	Bak Fiberglass	2	Lokal / Custom	2013

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
297	Aqua Guard	1	Lux / -	2006
298	Stabilizer	3	-	2009
299	Peralatan Pemcampur Kompos & Bio Stabilizer	3	Beje 800D / -	2014
300	TV Monitor	2	Samsung / Samsung	2007
301	Mesin Pengepres Buah	1	- / -	2006
302	Meja Kerja	10	Haigh Point / Haigh Point	2007
303	Meja Kerja	38	Lokal / -	2008
304	Printer	1	Epson / LQ-2190	2011
305	Printer	1	HP.Laser Jet / 2055	2011
306	Printer	1	Epson / LQ-2190	2011
307	Anak Timbangan Bidur	2	Ankatama / Custom	2017
308	Mesin Hitung Manual	2	Casio	2008
309	Mesin Calculator	1	Casio	2009
310	Mesin Calculator	3	Citizen / ct-90011	2010
311	Mesin Calculator	8	Citizen / CT-914 D	2012
312	Filling Kayu	5	Graver / -	2006
313	Filling Kayu	6	Graver / -	2006
314	White Board	1	-	2009
315	Kursi Rapat	25	Custom / Cover Merah	2017
316	Kursi Tamu	16	- / -	2014
317	Kursi Putar	2	Rakuda / Issebele 225 HDW	2008
318	Kursi Putar	8	Rakuda / Issebele 225 HDW	2008
319	Kursi Lipat	2	Frontline / -	2006
320	Kursi Lipat	6	chitose	2009
321	Kursi Lipat	2	Chitose / Yamato NN	2012
322	Kursi Lipat	28	Chitose / Yamato NN	2012
323	Kursi Lipat	3	Tiger / T-3022	2013
324	Kursi Lipat	35	Tiger / T-3022	2013
325	Jam Mekanis	5	Seiko / Bundar	2008
326	Kipas Angin	2	National / -	2006
327	Kipas Angin	1	National / -	2006
328	Kipas Angin	3	Maspion	2008
329	Kipas Angin	3	Maspion	2009
330	Alat Dapur Lainnya	2	lokal / -	2009

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Type / Merk	Tahun Perolehan
1	2	3	4	5
331	Alat Dapur Lainnya	4	ASA / Botol	2011
332	Gorden	1	Lokal / 1 Daun Jendela	2006
333	Gorden	14	Sharp Poin / SP 8005 Blue	2017
334	Printer	9	Canon / Pixma IP2770	2014
335	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	RJ / 45	2009
336	Microphone Floor Stand	1	Raschsehr / SR-2008	2014
337	Microphone	3	TOA / ZM-260	2014
338	Loudspeaker	6	TOA / ZH-5025B	2014

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kinerja pelayanan sebelumnya, yang ditetapkan secara umum dan akan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka jelas bahwa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara rutin harus dilaksanakan setiap tahun dan setiap lima tahun berkisar pada perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap aktivitas industri dan perdagangan, yang pencapaian kinerjanya dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		1- (2017)	2- (2018)	3-(2019)	4-(2020)	5-(2021)	1- (2017)	2- (2018)	3-(2019)	4-(2020)	5- (2021)	1- (2017)	2- (2018)	3- (2019)	4- (2020)	5- (2021)
1	Pertumbuhan IKM	2.81	1.68	2.05	2.4	2.92	2.81	1.86	2.05	0,40	-	100	100	100	16,66	
2	Jumlah Sentra	0	0	0	1	1	0	0	0	1	-	0	0	0	100	
3	Cakupan Sertifikasi produk IKM	0	13	13	27	27	100	92.31	0	20	-	100	100	0	74	
4	Pertumbuhan omzet IKM	1.14	1.21	3.22	4.89	-	1.5	1.7	2.0	1.44	-	100	100	62.11	29	
5	Pertumbuhan pelaku ekonomi yang tertib niaga	9.7	1.51	3.23	3.13	3.03	9.7	4.9	22.81	-3.89	-	100	100	100	-124	
6	Nilai ekspor bersih perdagangan	84,388	86,920	88,658	91,091	95,646	68,386,360	-	56,980,399	293,948,407	-	100	-	100	100	
7	Pertumbuhan Ekspor	2	3	1.96	2.67	4.76	2,00	3,00	-	80.62	-	100	100	-	100	
8	Pertumbuhan pedagang sektor perdagangan besar dan kecil	4.2	15	5	0.58	0.5	7.91	31.81	5.43	26.12	-	100	100	100	100	
10	Indeks Kualitas Pasar	-	-	-	80.15	80.80	-	-	-	43.00	-	-	-	-	54	
11	Indeks kepuasan pelayanan pasar	-	-	-	70	85	-	-	-	72.44	-	-	-	-	100	
12	pertumbuhan pendapatan pasar	-	-	-	19.90	25	-	-	-	34.49	-	-	-	-	100	

2.4 Pelaksanaan Anggaran Dan Realisasi Belanja

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Daya serap anggaran terhadap realisasi harus sehingga prinsip efektif dan efisien dapat tercapai. Berikut ini adalah gambaran anggaran dan realisasi belanja langsung Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	180,000,000	814,048,950	569,161,177	1,439,719,200.00	-	17,850,000.00	801,375,800	489,933,800	1,231,855,510.00	0.10	0.98	0.86	0.86	-	100.00	100.00
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,513,003,944	3,513,003,944	5,712,181,742	7,100,567,589.76	-	3,147,750,697	3,147,750,697	5,469,303,722	6,206,972,571.00	0.90	0.90	0.96	0.87	-	28.97	29.08
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	908,835,361.74	1,159,738,625	1,403,121,158	2,744,978,720.00	-	181,662,625	971,116,935	1,312,126,773	2,573,112,840.00	0.20	0.84	0.94	0.94	-	48.08	100.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	100,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-	72,727,840	87,282,600.00	0.00	0.00	0.73	0.58	-	16.67	6.67
5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	345,000,000	1,788,625,950	525,000,000	950,000,000	-	211,203,000	1,275,796,955	470,024,644	892,964,360.00	0.61	0.71	0.90	0.94	-	100.00	100.00
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	75,000,000	50,000,000	224,694,166	-	-	44,130,877	35361596	196,447,500	-	0.59	0.71	0.87	0.00	-	72.02	100.00
7	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3,726,538,500	3,871,984,795.00	6,920,680,000	775,820,000.00	-	3,167,668,900	3155153450	5,799,091,849	251,108,600.00	0.85	0.81	0.84	0.32	-	- 2.05	-4.09
8	Program Pembinaan	202,069,400	250,000,000	150,000,000	-	-	63,705,000	200,915,300	93,953,000	-	0.32	0.80	0.63	0.00	-	- 38.76	20.72

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pedagang kaki Lima dan Asongan																
9	Program Pengembangan Kelembagaan IKM	350,000,000	-	-	7,368,760,000.00	-	255,326,500	-	-	6,054,604,508.00	0.73	0.00	0.00	0.82	-	-33.33	-33.33
10	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar	-	-	-	9,366,043,558.00	-	-	-	-	8,640,296,970.00	0.00	0.00	0.00	0.92	-	-	0.00
11	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	150,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
12	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-	1503818207	1,845,000,000	7,368,760,000.00	-	-	568,348,650.00	1,069,734,485	6,054,604,508.00	0.00	0.38	0.58	0.82	-	100.00	100.00
13	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	-	341,849,000	1,496,637,000	-	-	-	-	900,100,300	-	0.00	0.00	0.60	0.00	-	79.27	-33.33
14	Program pengembangan sentra sentra industri potensial	-	-	100,000,000	-	-	-	-	67,150,400	-	0.00	0.00	0.67	0.00	-	-33.33	-33.33
15	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	-	-	-	-	22,748,130,910	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	2,428,889,990	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
17	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	-	-	-	-	199,999,620	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
18	Program Pengembangan ekspor	-	-	-	-	199,999,620	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
19	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
20	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
21	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	-	-	-	-	4,100,000,022	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
22	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.5.1 Tantangan

Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah memberi pelayanan dalam proses perencanaan dengan wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pembinaan dibidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, dan pertumbuhan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi;
3. Produk industri berdaya saing rendah;
4. Produk Industri dan perdagangan yang masih harus di perbaiki mengingat produk dari luar negeri sebagai pesaing makin banyak.
5. Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;
6. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok
7. Kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar tradisional belum memadai
8. Penataan Sistem dan Sarana Distribusi Perdagangan
9. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan

Tantangan yang ada saat ini menjadi perhatian serius Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan urusan industri dan perdagangan Kutai Kartanegara.

2.5.2 Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5

(lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Rencana Pemindahan Ibukota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, yang mendukung peningkatan daya saing di level daerah Kabupaten.
3. Potensi hasil dan produk unggulan daerah
4. Peluang Pasar Ekspor yang cukup banyak
5. Meningkatnya jumlah pasar di daerah.
6. Jumlah pelaku industri dan perdagangan yang cukup besar dan terus berkembang
7. Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi organisasi saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan dapat dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan, dan strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan DISPERINDAG

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan berfungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan, pengoordinasian, pembinaan bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi urusan industri dan perdagangan.

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya pertumbuhan sektor industri kecil menengah, hal tersebut disebabkan oleh produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi dan kondisi pandemi covid 19 yang di alami mulai tahun 2020 dan menurunnya permintaan dalam negeri seiring dengan kasus Covid 19 yang mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat, infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan pengolahan hasil-hasil pertanian dalam arti luas belum optimal.

Secara umum sektor perdagangan menurun karena pandemi covid 19, yang menyebabkan mobilitas selama pandemi yang dibatasi mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), otomatis kegiatan perdagangan yang memerlukan mobilitas yang tinggi terkendala dan menunjukkan penurunan. Selain kondisi pandemi covid 19 terdapat beberapa permasalahan seperti pengelolaan perijinan perdagangan yang belum

terkelola secara baik, perlindungan konsumen melalui layanan metrologi belum optimal, dan masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung layanan perdagangan. Beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi dapat dipetakan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pokok Masalah	Masalah		Akar Masalah
Masih rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam mendukung perekonomian daerah	Masih rendahnya pertumbuhan Industri Kecil menengah	1	Omset dan nilai investasi pada Industri kecil menengah belum berkembang
		2	Skala Produksi dan kualitas produk pada IKM belum memenuhi spesifikasi target pasar
		3	kawasan/ sentra IKM yang berbasis pertanian belum berkembang dan terkelola dengan baik
Masih rendahnya pertumbuhan dan tata kelola sektor perdagangan besar dan eceran dalam mendukung perekonomian daerah	Masih rendahnya tata niaga dan layanan perdagangan	1	mekanisme dan Rekomendasi pemberian Perijinan usaha pada pelaku usaha perdagangan belum terkelola dengan baik
		2	Jangkauan dan kualitas layanan metrologi belum optimal
		3	Manajemen dan Kualitas layanan perdagangan belum optimal
		4	Masih rendahnya literasi dan pemanfaatan teknologi digital pada layanan perdagangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, & Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tersebut. visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, dimana tema pembangunan periode keempat ini menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara terpilih adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

SEJAHTERA:

Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

BERBAHAGIA:

Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. **Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani**
Dengan sasaran kebijakan pembangunan pada Penguatan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Kualitas Layanan publik, Fasilitasi Kesejahteraan ASN, dan Penerapan Kerjasama Pemerintah Daerah
2. **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya**
Dengan sasaran kebijakan pembangunan pada peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kualitas Layanan Kesehatan, Kompetensi Tenaga Kerja, Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial dan Pelestarian Budaya Daerah
3. **Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
Dengan sasaran kebijakan pada pembangunan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas, Optimalisasi Potensi Wisata ALAM, SEJARAH DAN BUDAYA, dan Pengembangan UMKM
4. **Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah**

Dengan sasaran kebijakan pada pembangunan Infrastruktur Wilayah, Perumahan, Air Bersih, dan Energi

5. **Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan**

Dengan sasaran kebijakan pada pembangunan Pembangunan Daerah berbasis Lingkungan Hidup Yang Lestari

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian periode 2021-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian periode 2021-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Dengan memperhatikan penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara di atas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi tiga yaitu ***“Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”***.

Dalam mewujudkan Misi 3 RPJMD tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan (Tujuan 4 RPJMD), yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan dengan indikator tujuan “Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara”. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 4 sasaran pembangunan yaitu (1) Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah. (2). Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah. (3) Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif. (4). Meningkatnya daya saing investasi daerah. DISPERINDAG Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung sasaran 1 yaitu Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah yaitu mendukung pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan rantai nilai ekonomi (Value Chain) lokal/daerah, dengan menguatkan integrasi hulu dan hilir pengembangan sektor unggulan berbasis pertanian dalam arti luas.

Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel berikut:

Tabel 5. Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Misi RPJMD yang terkait dengan Peran Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kompetensi SDM Industri Kecil menengah masih rendah	Dukungan terhadap regulasi dan sarana prasarana
		Masih rendahnya daya saing produk industri Kecil Menengah	Keterlibatan seluruh stakeholders dalam pengembangan dan pemasaran produk
		Industri Kecil berbasis komoditas lokal belum berkembang secara optimal	Era revolusi 4.0 dan Digitalisasi
		Sentra Industri Kecil Menengah berbasis pertanian dalam arti luas belum terintegrasi	Kebijakan peningkatan dan penguatan kapasitas SDM Perangkat Daerah
		Kesadaran pelaku usaha perdagangan dalam tertib usaha masih lemah	
		Infrastruktur pendukung perdagangan belum optimal	
		stabilitas harga barang pokok dan penting lainnya cenderung naik	

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Telaahan Renstra Provinsi

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi antara Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, dengan tujuan dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Sinkronisasi antara Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan

kabupaten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang Perindustrian dan Perdagangan. Adapun keterkaitan atau sinergitas tersebut tersaji sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Sasaran Kementerian,Dinas Provinsi dengan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kab. Kutai Kartanegara

Sasaran Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Sasaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Sasaran DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKOP & UMKM Provinsi Kaltim	Sasaran DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kab.Kutai Kartanegara
Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0"	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan
Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab		
Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	Meningkatnya pasar produk dalam negeri		
Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK , Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)		
Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional		
Meningkatnya Persebaran Industri	Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan		
Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif			
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Terkait dengan rencana tata ruang wilayah, saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kukar Tahun 2013-2032, namun sejalan dengan perkembangan dinamika pembangunan dan dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara (IKN), maka Kabupaten Kukar masuk dalam Delineasi Wilayah Rencana IKN tersebut sehingga perlu dilakukan Revisi RTRW Kabupaten Kukar dan hal ini sesuai dengan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bahwa RTRW Kabupaten Bisa Ditinjau Kembali Lebih Dari 1 Kali dalam 5 tahun. Dengan adanya hal tersebut, maka telaah terhadap Rencana tata ruang wilayah tidak dilakukan mengingat saat dokumen rencana strategis ini dibuat, proses revisi RTRW kabupaten Kutai Kartanegara juga sedang berjalan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2018 pasal 23 disebutkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan KLHS RPJPD, pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD dan perubahan RPJPD.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, diidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan dalam 5 (Lima) tema yaitu:

1. Isu Strategis Pengelolaan Pertambangan
2. Isu Strategis Lingkungan Hidup
3. Isu Strategis Infrastruktur
4. Isu Strategis Ekonomi dan Pertanian
5. Isu Strategis Kelautan dan Perikanan

Selaras dengan prinsip KLHS, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN yang memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan urusan perindustrian dan perdagangan, perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran pembangunan yang direncanakan.

Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan di Kutai Kartanegara telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (interdependency), yaitu saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (equilibrium), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (justice) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

KLHS RPJMD yang disusun difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodir isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam pilar sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola.

Identifikasi isu strategis pada KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara didasari oleh penilaian terhadap kondisi sebagai berikut:

1. Berpotensi menimbulkan lingkungan hidup dan sosial ekonomi yang relevan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama kemacetan, persampahan, konversi lahan, gentrifikasi, PKL, dan nilai hidup dan budaya
2. Mempunyai relevansi untuk dapat segera diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun untuk meminimalisir dampak kumulatif yang lebih luas
3. Menyangkut hajat hidup orang banyak atau khalayak (pemangku kepentingan)

Selaras dengan prinsip KLHS dan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, membina perencanaan dan pengendalian pembangunan, perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran pembangunan yang direncanakan.

Tabel 7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Pilar
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Sosial
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Ekonomi
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara	Ekonomi
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Lingkungan
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	Lingkungan
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum dan Tata Kelola
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan dibidang industri dan perdagangan, dikarenakan dampaknya bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, yaitu:

1. Keunggulan potensi Industri dan perdagangan
2. Kolaborasi industri besar dan industri kecil menengah.
3. Penumbuhan ekonomi baru yang inovatif dan kreatif.
4. Adaptif terhadap perkembangan jaman dan penyesuaian terhadap era new normal
5. Era industri baru yaitu industri 4.0

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sepanjang dalam tahun 5 (lima) ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sesuai dengan Misi ke-3 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 yaitu “**Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**” yang kemudian diturunkan dalam Tujuan Meningkatkan perekonomian daerah berbasiskan pada sektor terbarukan serta terbagi dalam 4 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah
2. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah
3. Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif
4. Meningkatnya daya saing investasi daerah.

Maka pada logframe perencanaan integratif untuk pencapaian Misi 3 (tiga) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, dapat dilihat bahwa DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas yang sesuai dengan sasaran ***Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah*** dan di “Cascading” menjadi Tujuan dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu

1. Peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan dengan indikator kinerja (1). LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kategori industri pengolahan, (2) Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
2. Peningkatan akses dan tata kelola Perdagangan besar dan eceran dengan Indikator kinerja LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kategori perdagangan besar dan eceran

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sasaran diupayakan untuk dicapai dalam periode tahunan.

Berdasarkan rumusan tujuan yang terurai diatas, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
2. Meningkatnya kualitas layanan perdagangan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut

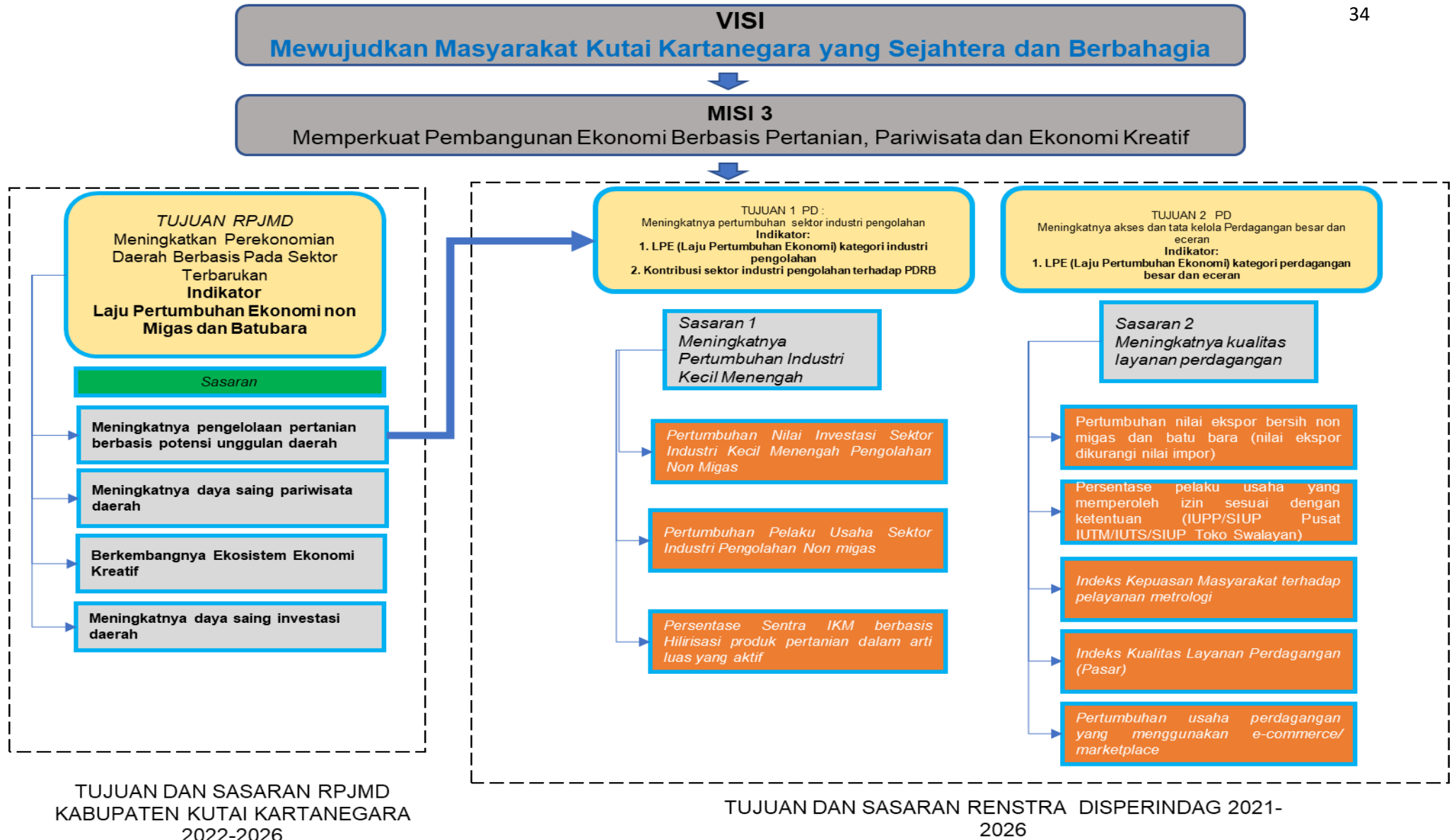
Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KETERANGAN
				2021	2022	2023	2024	2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	
I	Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan.	1	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kategori industri pengolahan	6,33	3,88	3,21	3,92	6,97	Indikator Tujuan
II	Meningkatkan akses dan tata kelola Perdagangan besar dan eceran	1	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kategori Perdagangan Besar dan Eceran	6,44	5,56	2,51	3,39	4,50	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah		Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	2,30	3,50	3,70	4,10	4,80	Indikator Kinerja Utama
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	2,40	3,50	3,80	4,30	4,70	Indikator Kinerja Utama
			Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	100	100	100	100	100	Indikator Kinerja Utama
2	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan		Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	2	2	2	2	2	Indikator Kinerja Utama
			Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh ijin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	30,28	42,52	55,84	69,87	84,25	Indikator Kinerja Utama
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	NA	65	75	80	85	Indikator Kinerja Utama
			Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)	75	77	82	87	92	Indikator Kinerja Utama
			Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace	20	20	20	20	20	Indikator Kinerja Utama

Dalam sasaran terdapat Indikator terukur yang menjadi **Indikator Kinerja Utama** (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai indikator yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan

RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Keterkaitan secara linieritas Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 6. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan, isu strategis dan peluang yang telah diidentifikasi pada bab-bab sebelumnya.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari yang di emban DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

5.1 STRATEGI 1 PENINGKATAN NILAI TAMBAH, LAPANGAN KERJA, DAN INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI KECIL MENENGAH PENGOLAHAN NON MIGAS

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kabupaten Kutai Kartanegara dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang industri, khususnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri kecil menengah. Strategi penguatan pembangunan dan struktur sektor industri kecil menengah berbasis keunggulan daerah dimaksudkan agar kedepannya dukungan terhadap hilirisasi produk pertanian dalam arti luas sebagai sektor unggulan daerah dapat berjalan optimal yang tujuan akhirnya adalah

dukungan terhadap pengelolaan hasil pertanian dapat mempunyai nilai tambah yang lebih optimal. Arah kebijakan dari strategi ini adalah:

- peningkatan kemudahan dan pengawasan layanan terhadap perijinan
- Pengembangan basis data dan informasi perencanaan bidang industri
- Penguatan Kapasitas dan pembinaan Kompetensi SDM Industri
- Pengembangan Kawasan IKM yang terintegrasi dan berbasis produk unggulan daerah

5.2 STRATEGI 2 PENGUATAN PENGUASAAN PASAR DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA JARINGAN DISTRIBUSI BARANG

Pemanfaatan potensi pasar dalam dan luar negeri menjadi hal penting untuk dilaksanakan. Pasar domestik diharapkan menjadi pijakan atau tumpuan awal dalam pengembangan dan dukungan terhadap industri sebelum melangkah lebih jauh ke pasar ekspor. Potensi pasar domestik dan pengelolaan tata niaga yang berkualitas harus benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan mendorong pengembangan sektor perdagangan dan industri di daerah.

Strategi penguatan penguasaan pasar dalam negeri dan luar negeri serta jaringan distribusi barang bertujuan untuk memanfaatkan pasar domestik dan mencapai skala ekonomi dari perluasan pasar domestik dan produk lokal yang berorientasi ke luar dengan menggarap pasar ekspor agar keuntungan yang diperoleh menjadi lebih optimal serta meningkatkan efisiensi sistem distribusi perdagangan. Adapun arah Kebijakan dari strategi penguatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu:

- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran dengan pihak ketiga
- Penguatan jejaring perdagangan produk lokal melalui ekosistem offline dan perdagangan secara elektronik (e-commerce)
- penguatan Fungsi dan Peran Pasar Daerah Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian daerah
- Fasilitasi kemudahan dan pendampingan kepada pelaku dalam legalitas usaha/perijinan Penguatan mekanisme, distribusi dan jejaring perdagangan

5.3 STRATEGI 3 PENGUATAN LAYANAN PERDAGANGAN YANG TERTIB (NIAGA, MUTU DAN UKUR) DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN

Dalam rangka memperkuat fungsi pelayanan dan pengawasan kemetrollogian dan mendukung komitmen dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang beredar di wilayah kabupaten/kota tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku maka menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Karanegara untuk melakukan hal tersebut sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Strategi penguatan layanan perdagangan yang tertib (niaga, mutu dan ukur) dan pemberdayaan konsumen menjadi Upaya dalam rangka penguatan layanan yang berkualitas dan peningkatan kesadaran terhadap perlindungan konsumen sehingga masyarakat menjadi konsumen cerdas arah kebijakan dari strategi ini adalah:

- Optimalisasi pengawasan dan layanan metrologi serta perlindungan konsumen
- Penguatan Mekanisme pengawasan dan stabilisasi harga bahan pokok/ penting serta perlindungan konsumen.

Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	URUSAN PERINDUSTRIAN Meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	1	Penguatan pembangunan dan struktur sektor industri kecil menengah berbasis keunggulan daerah	peningkatan kemudahan dan pengawasan layanan terhadap perijinan
			2		Pengembangan basis data dan informasi perencanaan bidang industri
			3		Penguatan Kapasitas dan pembinaan Kompetensi SDM Industri
			3		Pengembangan Kawasan IKM yang terintegrasi dan berbasis produk unggulan daerah
2	URUSAN PERDAGANGAN Meningkatnya akses dan tata kelola Perdagangan besar dan eceran	Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	1	Penguatan penguasaan pasar dalam negeri dan luar negeri serta Jaringan Distribusi Barang	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran dengan pihak ketiga
	INDIKATOR: 1. LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kategori		2		penguatan jejaring perdagangan produk lokal melalui ekosistem offline dan perdagangan secara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator		Strategi	Arah Kebijakan
	perdagangan besar dan eceran					elektronik (e-commerce)
			3	Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)		penguatan Fungsi dan Peran Pasar Daerah Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian daerah
			4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		fasilitasi kemudahan dan pendampingan kepada pelaku dalam legalitas usaha/perijinan
			5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	penguatan layanan perdagangan yang tertib (niaga, mutu dan ukur) dan pemberdayaan konsumen	Optimalisasi pengawasan dan layanan metrologi serta perlindungan konsumen
						Penguatan Mekanisme pengawasan dan stabilisasi harga bahan pokok/ penting serta perlindungan konsumen

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan merujuk pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Lebih dari itu rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71.29	75.00	22,825,034,769	77.00	23,025,034,769	78.00	23,025,034,769	80.00	23,025,034,769	85.00	23,025,034,769	85.00	114,925,173,845	Disperinda g
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana,anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	7	6	575,123,500	6	575,123,500	6	575,123,500	6	575,123,500	7	575,123,500	31	2,875,617,500	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen profil Disperindag	Dok	1	1	267,623,500	1	267,623,500	1	267,623,500	1	267,623,500	1	267,623,500	5	1,338,117,500	
		Jumlah Dokumen renstra	Dok	1	1		1		1		1		1		5		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dibuat (Renja, LPPD, LKJIP, perjanjian kinerja)	Dok	4	4	157,500,000	4	157,500,000	4	157,500,000	4	157,500,000	4	157,500,000	20	787,500,000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi	Dok	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	750,000,000	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Laporan	1	1	13,863,027,507	1	13,863,027,507	1	13,863,027,507	1	13,863,027,507	1	13,863,027,507	5	69,315,137,535	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	Orang	12	12	13,697,903,907	12	13,697,903,907	12	13,697,903,907	12	13,697,903,907	12	13,697,903,907	60	68,489,519,535	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Dok	1	1	165,123,600	1	165,123,600	1	165,123,600	1	165,123,600	1	165,123,600	5	825,618,000	
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dok	1	1	135,000,000	1	135,000,000	1	135,000,000	1	135,000,000	1	135,000,000	5	675,000,000	

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan dan jumlah Unit BMD	Dok ;Unit	1 ; 1088	1 ; 1088	135,000,000	1 ; 1088	135,000,000	1 ; 1088	135,000,000	1 ; 1088	135,000,000	1 ; 1088	135,000,000	5 ; 5.440	675,000,000	
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Dok	1	1	137,500,000	1	337,500,000	1	337,500,000	1	337,500,000	1	337,500,000	5	1,687,500,000	
1	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stell	74	74	-	74	200,000,000	74	200,000,000	74	200,000,000	74	200,000,000	370	1,000,000,000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN	Orang	1	6	67,500,000	11	67,500,000	12	67,500,000	11	67,500,000	11	67,500,000	51	337,500,000	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN	Orang	15	15	70,000,000	15	70,000,000	15	70,000,000	15	70,000,000	15	70,000,000	75	350,000,000	
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	Layanan	8	8	1,269,625,000	8	1,374,625,000	8	1,424,625,000	8	1,524,625,000	8	1,574,625,000	40	7,768,125,000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	1.) Jumlah penyediaan jenis komponen instalasi listrik	Bulan	12	12	275,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	60	1,175,000,000	
		2.) Jumlah pemasangan meteran listrik	Meteran Listrik	1	20		0		0		0		0		20		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	85	85	140,000,000	85	140,000,000	85	140,000,000	85	140,000,000	85	140,000,000	425	700,000,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1) Jumlah Makanan dan Minuman	Porsi	5000	5000	237,000,000	5000	237,000,000	5000	237,000,000	5000	237,000,000	5000	237,000,000	25000	1,185,000,000	
		2) Jumlah Alat Kebersihan dan Alat Rumah Tangga	Jenis	50	50		50		50		50		50		250		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	Jenis ; Cetakan	7	7 ; 16000	75,000,000	7 ; 16000	75,000,000	7 ; 16000	75,000,000	7 ; 16000	75,000,000	7 ; 16000	75,000,000	35 ;8.000	375,000,000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Exemplar	4500	4500	10,125,000	4500	10,125,000	4500	10,125,000	4500	10,125,000	4500	10,125,000	22500	50,625,000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Orang/Hari	100	100	345,000,000	100	650,000,000	100	700,000,000	100	800,000,000	100	850,000,000	500	3,345,000,000	

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jenis	4	4	112,500,000	4	112,500,000	4	112,500,000	4	112,500,000	4	112,500,000	20	562,500,000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi	Aplikasi	1	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	5	375,000,000	
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis	3	4	730,000,000	3	730,000,000	3	730,000,000	3	730,000,000	3	730,000,000	16	3,650,000,000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	40	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	-	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	unit Truck sampah	2	1	550,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	5	2,750,000,000	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	6	6	90,000,000	6	90,000,000	6	90,000,000	6	90,000,000	6	90,000,000	30	450,000,000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	3	3	90,000,000	3	90,000,000	3	90,000,000	3	90,000,000	3	90,000,000	15	450,000,000	
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	bulan	12	12	4,895,209,052	12	4,895,209,052	12	4,895,209,052	12	4,895,209,052	12	4,899,185,052	60	24,476,045,260	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat	Lembar / Bulan	750	750	2,024,000	750	2,024,000	750	2,024,000	750	2,024,000	750	6,000,000	3750	10,120,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jenis Rekening/Bulan	4	4	650,000,000	4	650,000,000	4	650,000,000	4	650,000,000	4	650,000,000	20	3,250,000,000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS	Orang/Bulan	175	175	4,243,185,052	175	4,243,185,052	175	4,243,185,052	175	4,243,185,052	175	4,243,185,052	875	21,215,925,260	

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2) Jumlah gedung yang jasa kebersihan kantor	Gedung / Bulan	2	2		2		2		2		2		10	-	
I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah	unit	1088	1150	1,219,549,710	1250	1,219,549,710	1350	1,219,549,710	1450	1,219,549,710	1600	1,219,549,710	6800	6,097,748,550	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit/Bln	40	40	141,233,100	40	141,233,100	40	141,233,100	40	141,233,100	40	141,233,100	200	706,165,500	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit /Bln	13	13	378,316,610	13	378,316,610	13	378,316,610	13	378,316,610	13	378,316,610	65	1,891,583,050	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1) Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	6	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	25	2,500,000,000	
		2) Jumlah rehabilitasi gedung kantor	Unit		1		1		1		1		1		5		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	4	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	20	500,000,000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	15	15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	15	100,000,000	75	500,000,000	
II	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen perencanaan dan Unit Sentra pengembangan industri	dokumen	2.00	2.00	21,920,000,000	2.00	3,195,000,000	2.00	20,045,000,000	1.00	20,110,000,000	1.00	4,650,000,000	8	69,920,000,000	Disperindag

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
II.1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Jumlah Sentra	sentra IKM	1.00	1.00	21,920,000,000	-	3,195,000,000	-	20,045,000,000	1.00	20,110,000,000	1.00	4,650,000,000	3	69,920,000,000	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	dokumen	1	0	-	0	-	0	-	0	-	1	350,000,000	2	350,000,000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen	1	-	-	2	125,000,000	1	75,000,000	0	-	0	-	3	200,000,000	
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan IKM	dokumen	1	2	600,000,000	1	525,000,000	1	200,000,000	1	600,000,000	0	-	5	1,925,000,000	
		Jumlah dokumen identifikasi komoditi unggulan	dokumen	na	1		-		-		-		-		1		
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Tahapan Pembangunan Sentra IKM	unit	Na	33.6	20,100,000,000	2.01	1,200,000,000	30.6	18,325,000,000	30.5	18,245,000,000	3.26	1,950,000,000	100	59,820,000,000	
		Jumlah bantuan alat produksi IKM	unit	32	15		25		25		20		30		115		
		Jumlah pengadaan peralatan sentra IKM rumput laut	paket	0	1		0		0		0		0		1		
		Jumlah ODTW yang di fasilitasi	unit	0	1		1		0		1		1		4		
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Event Dekranasda yang di ikuti	dokumen	1	2	1,145,000,000	3	1,195,000,000	4	1,270,000,000	4	1,065,000,000	6	2,150,000,000	19	6,825,000,000	
		Jumlah IKM yang difasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi	IKM	54	25		45		50		50		50		220		

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Evaluasi	kali	na	4	75,000,000	4	150,000,000	4	175,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	20	800,000,000	
III	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	Persen	100	100	100,000,000	100	200,000,000	100	250,000,000	100	290,000,000	100	400,000,000	100	1,240,000,000	Disperindag
III.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	Persen		79.04	100,000,000	83.84	200,000,000	88.65	250,000,000	93.45	290,000,000	98.25	400,000,000	98.25	1,240,000,000	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	Persen		0.02		0.04		0.06		0.08		0.1		0.1		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten	Persen		0.02		0.04		0.06		0.08		0.1		0.1		

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM yang memperoleh Ijin Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	BAP	na	0	-	7	75,000,000	10	100,000,000	15	115,000,000	18	150,000,000	50	440,000,000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah frekuensi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri	kali	28	13	100,000,000	15	125,000,000	17	150,000,000	20	175,000,000	25	250,000,000	90	800,000,000	
IV	Program Pengelolaan Sistem Informasi Indsutri Nasional	Persentase IKM yang masuk dalam SINAS	Persen	1.11	2.90	100,000,000	3.87	525,000,000	4.64	650,000,000	5.80	685,000,000	7.74	775,000,000	24.95	2,735,000,000	Disperinda g
IV. 1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	informasi	na	33	100,000,000	38	525,000,000	44	650,000,000	50	685,000,000	56	775,000,000	221	2,735,000,000	
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Lokasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang difasilitasi	Kecamatan	na	0	-	18	150,000,000	18	225,000,000	18	235,000,000	18	275,000,000	72	885,000,000	

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah dokumen yang di Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	dokumen	na	0	-	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	4	1,000,000,000	
3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	kali	na	4	100,000,000	4	125,000,000	4	175,000,000	4	200,000,000	4	250,000,000	20	850,000,000	
V	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persen	100.00	100.00	150,000,000	100.00	250,000,000	100.00	325,000,000	100.00	370,000,000	100.00	500,000,000	100.00	1,595,000,000	Disperindag
V.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ijin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	Persen	Na	0	-	61	50,000,000	68	75,000,000	76	85,000,000	84	100,000,000	289	310,000,000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang diFasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	pelaku usaha	Na	0	-	70	50,000,000	80	75,000,000	90	85,000,000	90	100,000,000	330	310,000,000	
V.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	Surat TDG	Na	22	150,000,000	40	100,000,000	52	100,000,000	64	100,000,000	78	100,000,000	256	550,000,000	
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Verifikasi data TDG	Kecamatan		18	150,000,000	18	100,000,000	18	100,000,000	18	100,000,000	18	100,000,000	90	550,000,000	
		Jumlah dokumen regulasi tentang TDG	Dokumen		1		0		0		0		0		1	-	

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah dokumen perencanaan kawasan perdagangan bahan pokok penting	Dokumen		1		0		0		0		0		1	-	
V.3	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang diterbitkan	persen	Na	0	-	8	50,000,000	11	75,000,000	15	85,000,000	21	150,000,000	21	360,000,000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	pelaku usaha	Na	0	-	14	50,000,000	17	75,000,000	20	85,000,000	25	150,000,000	76	360,000,000	
V.4	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba luar Negeri yang diterbitkan	dokumen	Na	0	-	3	50,000,000	4	75,000,000	4	100,000,000	4	150,000,000	15	375,000,000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah pelaku usaha yang Fasilitasi pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Pelaku usaha	Na	0	-	3	50,000,000	3	75,000,000	4	100,000,000	4	150,000,000	14	375,000,000	
VI	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	persen	31.00	43.00	7,850,000,000	54.00	24,900,000,000	65.00	7,260,000,000	75.00	6,680,000,000	86.00	21,266,024,000	86.00	67,956,024,000	Disperindag

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	persen	2.48	3.33		3.35		3.62		4.22		4.22		18.74		
		Indeks Kualitas Pasar	nilai	43.00	48.00		53.00		58.00		62.00		67.00		67.00		
VI. 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	unit	4	2	7,550,000,000	4	24,600,000,000	5	6,930,000,000	4	6,330,000,000	5	20,866,024,000	20	66,276,024,000	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar Desa dan Kecamatan yang dibangun	unit	4	2	7,400,000,000	7	24,400,000,000	2	6,680,000,000	2	6,055,000,000	5	20,566,024,000	18	65,101,024,000	
		Jumlah pasar yang di revitalisasi	unit	3	1		1		1		1		1		5		
		Jumlah dokumen Pendataan, kajian dan perencanaan pembangunan pasar	dokumen	2	1		2		1		1		1		6		
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen indeks kepuasan pelayanan pasar	dokumen	1	1	150,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	300,000,000	5	1,175,000,000	
		Jumlah dokumen indeks kualitas pasar	dokumen	1	1		1		1		1		1		5		
VI. 2	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	unit UPP	5	5	300,000,000	5	300,000,000	5	330,000,000	5	350,000,000	5	400,000,000	5	1,680,000,000	
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	kali	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000	
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi	kegiatan	1	1	100,000,000	1	100,000,000	2	130,000,000	3	150,000,000	4	200,000,000	11	680,000,000	
		Jumlah Laporan pengelolaan Pasar	laporan	Na	1		1		1		1		1		5		

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
VII	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga antar waktu	Persen	3.77	3.72	700,000,000	3.67	1,025,000,000	3.62	1,250,000,000	3.57	1,355,000,000	3.52	1,500,000,000	3.52	5,830,000,000	Disperinda g
		Persentase pupuk bersubsidi yang di awasi	Persen	97.63	97.86		98.04		98.21		98.39		98.57		98.57		
VII. 1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	jenis	13	13	175,000,000	13	300,000,000	13	375,000,000	13	405,000,000	13	450,000,000	3.52	1,705,000,000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	kali		2	50,000,000	4	100,000,000	8	125,000,000	10	135,000,000	12	150,000,000	36	560,000,000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	kali		2	50,000,000	4	100,000,000	8	125,000,000	10	135,000,000	12	150,000,000	36	560,000,000	
3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	kali		2	75,000,000	4	100,000,000	8	125,000,000	10	135,000,000	12	150,000,000	36	585,000,000	
VII. 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	Persen	25.00	41.67	300,000,000	50.00	425,000,000	58.33	500,000,000	66.67	545,000,000	75.00	600,000,000	75.00	2,370,000,000	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang pokok dan barang penting pada pelaku usaha	kali	12	12	50,000,000	12	100,000,000	12	125,000,000	12	135,000,000	12	150,000,000	60	560,000,000	

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga dan stok barang pokok dan barang penting pada pasar rakyat	kali	12	12	50,000,000	12	100,000,000	12	125,000,000	12	135,000,000	12	150,000,000	60	560,000,000	
3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok	kali;Desa	20	15	200,000,000	17	225,000,000	18	250,000,000	19	275,000,000	20	300,000,000	89	1,250,000,000	
VII. 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumiah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	Ton	Na	80,000	225,000,000	82,273	300,000,000	84,546	375,000,000	86,819	405,000,000	89,091	450,000,000	422,729	1,755,000,000	
1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	dokumen	36	18	75,000,000	36	100,000,000	36	125,000,000	36	135,000,000	36	150,000,000	162	585,000,000	
2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk bersubsidi	kali	Na	2	75,000,000	4	100,000,000	4	125,000,000	4	135,000,000	4	150,000,000	18	585,000,000	
3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	kali	Na	2	75,000,000	4	100,000,000	4	125,000,000	4	135,000,000	4	150,000,000	18	585,000,000	
VIII	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan ekspor produk unggulan	Persen	Na	100.00	800,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00	1,250,000,000	100.00	1,355,000,000	100.00	1,550,000,000	100.00	6,055,000,000	Disperindag
VIII .1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	Persen	Na	1	800,000,000	1	1,100,000,000	1	1,250,000,000	1	1,355,000,000	1	1,550,000,000	5	6,055,000,000	

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemasaran komoditi unggulan perkebunan (sawit-CPO),lada dan (karet-produk turunan)	kali	Na	3	100,000,000	4	200,000,000	4	225,000,000	5	235,000,000	6	300,000,000	22	1,060,000,000	
2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah event pameran dagang nasional	event	3	3	200,000,000	3	225,000,000	4	250,000,000	5	275,000,000	6	300,000,000	21	1,250,000,000	
3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah event pameran dagang lokal	event	3	3	100,000,000	4	200,000,000	5	225,000,000	5	235,000,000	6	250,000,000	23	1,010,000,000	
4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah kemitraan dagang yang terjalin	Mou	Na	3	150,000,000	3	175,000,000	3	200,000,000	3	225,000,000	3	250,000,000	15	1,000,000,000	
5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah bimbingan Teknis terhadap IKM untuk peningkatan Citra Produk Ekspor	IKM	Na	20	100,000,000	20	125,000,000	20	150,000,000	20	175,000,000	20	200,000,000	100	750,000,000	
6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pembinaan pelaku dan calon pelaku ekspor	orang	-	40	150,000,000	40	175,000,000	40	200,000,000	40	210,000,000	50	250,000,000	210	985,000,000	
		Jumlah dokumen neraca perdagangan	dokumen	1	1		1		1		1		1		5		
IX	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	Persen	25.00	26.25	325,000,000	27.50	375,000,000	28.25	450,000,000	30.00	485,000,000	31.25	550,000,000	31.25	2,185,000,000	Disperindag
IX. 1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	17.99	17.99	325,000,000	18.47	375,000,000	19.06	450,000,000	19.41	485,000,000	20.00	550,000,000	94.92	2,185,000,000	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	unit	1,500	1,500	250,000,000	1,570	275,000,000	1,620	300,000,000	1,650	310,000,000	1,700	350,000,000	8040	1,485,000,000	

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
		Jumlah sosialisasi Kemeterologian Legal	kali	10	10		10		10		10		10		50		
		Jumlah fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal	unit	1	1		1		1		1		1		5		
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah penguasaan alat UTTP	kali pengawasan	18	18	75,000,000	18	100,000,000	18	150,000,000	18	175,000,000	18	200,000,000	90	700,000,000	
X	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di toko/ritel modern	Persen	na	95.24	605,000,000	97.60	675,000,000	98.56	715,000,000	98.81	765,000,000	99.04	850,000,000	99.04	3,610,000,000	Disperinda g
X.1	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi promosi	Persen	na	50	605,000,000	60	675,000,000	70	715,000,000	80	765,000,000	90	850,000,000	90	3,610,000,000	
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jenis promosi	kali	Na	3	100,000,000	3	125,000,000	3	150,000,000	3	175,000,000	3	200,000,000	15	750,000,000	
2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek	IKM	Na	20	400,000,000	20	425,000,000	20	430,000,000	20	435,000,000	20	450,000,000	100	2,140,000,000	
		Jumlah IKM yang memasarkan secara online yang diidentifikasi	dokumen	Na	1		0		0		0		0		1	-	
		Jumlah IKM yang didampingi terhadap IKM agar dapat mengakses pemasaran secara online	IKM	Na	50		50		50		50		50		250	-	
3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah segmen pasar	Jumlah kota (lokasi)	Na	2	105,000,000	2	125,000,000	2	135,000,000	2	155,000,000	2	200,000,000	10	720,000,000	
Total						55,375,034,769		55,375,034,769		55,375,034,769		55,375,034,769		55,375,034,769		276,875,173,845	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dirumuskan indikator Kinerja sektor industri dan perdagangan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan indikator kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan indikator program yang dilaksanakan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 11. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	2,30	3,50	3,70	4,10	4,80	4,90	4,90
2	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	2,40	3,50	3,80	4,30	4,70	4,90	4,90
3	Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	100	100	100	100	100	100	100
4	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	2	2	2	2	2	2	2
5	Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace	20	20	20	20	20	20	100
6	Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)Prasarana Pengembangan Wilayah (%)	75	77	82	87	92	97	97

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Ijin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	30,28	42,52	55,84	69,87	84,25	100	100
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrology	NA	65	75	80	85	90	90

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Rencana Strategis. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta stakeholder Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun;
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah

Dengan demikian hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 06 September 2021
Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Drs. H. TAJUDDIN.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640405 198603 1 036